

## MEMBANGUN KEMBALI EKONOMI INDONESIA DENGAN UPAYA REFORMASI

Oleh:

**Ginandjar Kartasasmita**  
**Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri**

**Disampaikan pada Musyawarah Nasional ke III Kamar Dagang dan Industri  
Jakarta, 8 Desember 1998**

### Pendahuluan

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara pada Munas ke III KADIN.

Thema Munas kali ini: "Membangun Kembali Ekonomi Indonesia", saya kira sangat tepat dibahas dalam Munas, tatkala faktor eksternal dan internal terhadap perekonomian di dunia, di kawasan dan perekonomian kita masih dalam gerak *turbulensi* yang belum menentu. Sementara itu kita ketahui tuntutan masyarakat pada perubahan-perubahan struktural menginginkan percepatan, sehingga menjadi tantangan bersama bagi kita dalam upaya membangun kembali ekonomi kita.

KADIN sebagai wadah organisasi dunia usaha, adalah mitra utama bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengembalikan pemulihan ekonomi dan dunia usaha, utamanya tatkala kita ingin memperbaharui tatanan kehidupan bangsa pada kehidupan yang lebih terbuka dan demokratis melalui reformasi ekonomi dan reformasi politik sekaligus. Reformasi politik yang memperbaharui tatanan struktur pengambilan keputusan di bidang politik, dapat mempercepat berkurangnya faktor-faktor negatif yang membebani perekonomian kita, seperti monopoli, kronisme, dan bentuk-bentuk penyimpangan yang merugikan. Demikian pula reformasi ekonomi, dapat mendorong percepatan proses demokratisasi karena semakin transparannya kebijakan ekonomi dan berperannya mekanisme pasar. Namun keduanya bila dijalankan sekaligus, bukan berarti tidak mengandung risiko. Kita harus pandai meniti buih untuk mendapatkan hasil yang sinergis antara keduanya.<sup>1</sup>

Dan memang tuntutan perubahan tatanan politik dan ekonomi di negara kita dan di dunia ke arah yang lebih demokratis tidak terhindari dan terus akan berlanjut dengan cepat. Dari tahun 1974-1990 saja, ada 30 negara di dunia yang bertransisi dari pemerintahan *authoritarian* ke arah pemerintahan yang lebih demokratis, dan diperkirakan meningkat pada dekade 1990.<sup>2</sup> Dengan demikian, tidak saja masyarakat politik dan birokrat di pemerintahan kita yang perlu menyadari dan tanggap pada tuntutan perubahan ini, tetapi juga masyarakat bisnis yang dalam Munas ke III ini akan membentuk kepengurusan baru serta program kerjanya.

Dalam suasana yang serba reformistis menuju tantangan masyarakat baru, melalui

---

<sup>1</sup> Banyak pengamat pembangunan ekonomi dan demokrasi, masih memperdebatkannya apakah reformasi ekonomi dan politik dilakukan oleh negara berkembang secara serentak atau bertahap *consecutive*, karena pilihan-pilihannya mengandung risiko bagi eksistensi negara atau masyarakat. Misalnya Diamond dan Plattner dalam bukunya: *Economic Reform and Democracy*, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1995, menyatakan: "The emergence of new democracies..has raised anew the question of the relationship between economic reform and political liberalization. Should economic reform come first, then political liberalization? Or political reform first, followed by economic change? Or both at the same time"?

<sup>2</sup> Lihat Samuel P. Huntington, "Democracy's Third Wave", dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner, *The Global Resurgence of Democracy*, Baltimore: The John Hopkins Univ.Press, 1993.

pelaksanaan hasil-hasil ketetapan SI MPR dan Pemilu 1999, saya mengajak agar KADIN juga mulai menggali sendiri dan turut menyumbangkan pemikiran yang *genuine* dalam membangun kembali perekonomian kita. Pikiran-pikiran itu tak perlu *terkooptasi* pada *opsi* tawaran pikiran dari bervariasinya kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dengan kendala-kendalanya.<sup>3</sup> Agendanya perlu disiapkan sekarang juga.

### Tantangan dan Agenda Kita

Di bidang ekonomi, reformasi yang sedang kita lakukan berlanjut di tengah krisis yang melanda bangsa kita sejak pertengahan tahun 1997 lalu.

Walaupun perekonomian kita telah bergerak menuju kondisi yang relatif stabil dengan tingkat inflasi yang mulai menurun; kurs Rupiah terhadap dollar yang mulai stabil; distribusi dan harga kebutuhan pokok yang mulai terkendali; sementara indikator perekonomian lainnya juga menunjukkan perkembangan yang membaik, faktor eksternal dan internal lainnya yang dapat mempengaruhi perekonomian perlu secara saksama kita pantau dan waspadai sebagai tantangan kita.

Di bidang moneter, faktor eksternal perlu kita pantau, misalnya sejauh mana kemungkinan keberhasilan proses strukturalisasi keuangan di Jepang, dan apa risikonya bila gagal? Demikian pula reformasi ekonomi di Rusia bahkan di Brazil dan risiko devaluasi di China.

Seperti diketahui krisis ekonomi yang masih kita hadapi dengan permasalahannya yang bertumpuk-tumpuk, telah membawa perekonomian kita mundur lebih dari satu dasawarsa dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihannya. Kita menyadari masih banyak kegiatan produksi dan ekspor yang mandeg; jumlah pengangguran masih menjadi ancaman karena industri telah mengurangi kegiatannya dan bahkan ada yang menghentikannya; kegiatan perbankan yang masih belum berjalan normal; jumlah orang miskin yang pernah mulai berkurang, kini bertambah kembali; dan tentunya kegiatan-kegiatan politik masyarakat terutama menjelang Pemilu 1999 yang dapat mempengaruhi pula perekonomian kita.

Untuk itu, kita tidak merencanakan program yang muluk-muluk untuk membangun kembali perekonomian kita. Pada saat ini, selain program-program pemulihan ekonomi yang telah dilakukan sejak pertengahan tahun lalu sampai sekarang, hasil-hasil Ketetapan MPR, khususnya Ketetapan nomor X dan XVI, sebagai suatu arahan, perlu segera kita pikirkan persiapan program dan pelaksanaannya.

Ketetapan MPR nomor X **Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara**, memang sangat ringkas masa pelaksanaannya sampai dengan Sidang Umum MPR tahun 1999. Namun agenda penyelesaiannya sebagai agenda dan sasaran pembangunan masih dapat terus berlanjut. Adalah tugas kita bersama untuk merincinya menjadi suatu kebijakan makro dan mikro yang (1)

---

<sup>3</sup> Saya kira tidak ada buruknya saya merujuk kepada pengamatan Susan Strange, seperti dikemukakan dalam bukunya *The Retreat of the State, The Diffusion of Power in the World Economy*, Cambridge University Press, 1996: "Today it seems that the heads of government may be the last to recognise that they and their ministers have lost the authority over national societies and economies that they used to have. Their command over outcomes is not what it used to be. Politicians everywhere talk as though they have the answers to economic and social problems, as if they really are in charge of their country's destiny. People no longer believe them. Disillusion with national leaders brought down the leaders of the Soviet Union and the states of Central Europe. But the disillusion is by no means confined to socialist systems. Popular contempt for ministers and for the head of state has grown in most of the capitalist countries - Italy, Britain, France and the United States are leading examples. Nor is the lack of confidence confined to those in office; opposition parties and their leaders are often no better thought of than those they wish to replace."

**transparan, (2) terprakirakan (*predictable*), serta (3) dalam lingkup waktu pelaksanaan yang jelas.** Ketiga syarat ini merupakan prasyarat tidak saja bagi jaminan keberhasilan usaha-usaha bagi pemerintah dalam membangun kembali ekonomi, bahkan lebih penting lagi bagi dunia usaha.

Demikian pula untuk Ketetapan MPR nomor XVI **Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.** Walaupun ketetapan tersebut baru diharapkan membentuk berbagai undang-undang, sebagai awal kehendak politik dan dasar pelaksanaannya kiranya harus menjadi salah satu agenda program kita. Memang diperlukan waktu untuk kelengkapan suatu undang-undang sampai kepada peraturan pelaksanaan dan programnya, namun memang tidak perlu ditawar-tawar lagi kalau kita sungguh-sungguh ingin menegakkan demokrasi ekonomi itu.

### **Modal Untuk Penyusunan Program**

Modal awal bagi upaya membangun kembali ekonomi kita, ialah semua tatanan perekonomian dan hasil pembangunan yang telah kita bangun selama tiga puluh tahun lebih, utamanya yang bersih dan baik, harus tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan pembangunannya. Diantaranya yang utama adalah prasarana ekonomi dan sumber daya manusia yang tidak hilang atau berkurang karena krisis moneter, atau karena gejala-gejala politik, adalah modal untuk kita memperbaiki dan membangun kembali ekonomi kita. Semua tatanan, kebijakan, dan cara-cara melakukan pembangunan ekonomi yang buruk, yang berakibat menyengsarakan rakyat dan mimpuruk ekonomi kita harus segera kita akhiri, dan dari pelajaran-pelajaran yang buruk itu, dapat kita gunakan sebagai “modal pengalaman” untuk tidak kita ulangi lagi.

Modal lainnya ialah langkah-langkah pelaksanaan program pemulihan ekonomi yang telah kita lakukan satu tahun terakhir sejak krisis moneter dimulai pada pertengahan tahun 1997. Perhatian utama pemerintah ditujukan kepada upaya bagaimana menghentikan kemerosotan dalam waktu yang sangat terbatas. Upaya-upaya tersebut di antaranya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan sosial ekonomi yang pokok bagi rakyat terutama penduduk miskin (*Social Safety Net*), membenahi perbankan nasional, mengatasi masalah hutang swasta, serta menciptakan lapangan kerja bagi para penganggur dan yang terkena PHK.

Secara sungguh-sungguh harus kita sadari bahwa masalah ekonomi yang kita hadapi adalah berat. Usaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memulihkan kembali kondisi perekonomian tidaklah mudah. Kita harus mengerahkan segenap daya upaya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang menjerat perekonomian kita. Itu sajapun tidak cukup, kita harus meminta bantuan masyarakat internasional, oleh karena memang ekonomi kita berada dalam keadaan yang parah.

Oleh karena itu kita telah meminta bantuan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan negara-negara sahabat. Kita membutuhkan bantuan dana dalam jumlah yang besar, tetapi juga kita membutuhkan bantuan teknik dan nasehat dari pengalaman lembaga-lembaga tersebut membantu menyelesaikan masalah-masalah serupa di negara-negara lain. Kompleksitas dan keunikan permasalahan yang kita hadapi menarik perhatian para pakar ekonomi ternama di dunia yang datang ke Indonesia, dan kita memperoleh banyak simpati dan uluran tangan untuk membantu.

Bantuan IMF yang dibarengi Pledge CGI dan kemudian penanggungan hutang luar negeri Pemerintah (*Informal Paris Club Meeting*), memberi sedikit angin segar bagi perekonomian nasional. Sebagian besar dana tersebut akan dipakai untuk mengatasi defisit APBN (*Cash Flow* pemerintah) yang sudah dianggarkan antara lain bagi pelaksanaan program *social safety net* dan sebagian lagi untuk cadangan neraca pembayaran.

Selain dari pada itu, kesepakatan-kesepakatan untuk menyetatkan perbankan kita -- dan sebenarnya masalah kelemahan perbankan ini dengan kompleksitas hutang swasta di luar dan dalam negeri juga merupakan pemacu kemerosotan perekonomian kita -- dengan mendirikan beberapa

kelembagaan seperti BPPN, INDRA, Prakarsa Jakarta dan Skema Penyelesaian BLBI, walaupun masih ada kekurangan-kekurangannya, kita harapkan dapat berkembang dengan baik.

Walaupun ekspor kita mengalami kelesuan, total ekspor periode Januari-September 1998 yang berjumlah US\$ 37.240 juta, diantaranya ekspor non-migas US\$ 31.289 juta, yang kenaikannya walaupun hanya 1,51% dibanding dengan periode yang sama tahun lalu namun masih tetap naik dalam nilainya. Sementara itu untuk mendorong ekspor tetap berkembang, beberapa skema *trade financing* semakin dikembangkan walaupun masih ada kekurangan-kekurangannya, seperti: (1) Program Jaminan L/C Impor melalui (i) Jaminan L/C dan Rediskonto Preshipment dengan penempatan dana BI; (ii) Garansi BI kepada bank-bank asing yang membuka *trade credit lines* bagi bank-bank nasional (Frankfurt Agreement); (iii) Skema EFIC Australia; (iv) Pinjaman JEXIM Bank; (v) US EXIM bank; (vi) GSM 102-USA; (vii) Skema dari Canada (Canada Wheat Board); dan beberapa skema lainnya dari Jerman, Canada, Belanda, Cina, Inggris, dan Singapura. (2) Skema Kredit Modal Kerja: (i) Preshipment Financing; (ii) Rediskonto atas dasar SKBDN; dan (iii) Skema Penggalakan Sektor Riel. (3) Pembiayaan Post-shipment melalui Rediskonto wesel ekspor berjangka (WEB). Sementara itu sedang disiapkan pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor yang dapat memadukan dan mendorong upaya ekspor.

Upaya pengembangan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri juga melibatkan peran pengusaha dan industri kecil. Empatbelas Skim Kredit Program untuk Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, telah disediakan untuk semakin memberdayakan kemampuannya. Sekarang sedang disiapkan Skim Kredit tambahan untuk nelayan dan peternak unggas.

Inti dari berbagai upaya memperbaiki kembali ekonomi kita adalah memulihkan kembali kepercayaan dunia usaha dan masyarakat pada perekonomian kita.

Pertama-tama harus diarahkan pada pengembalian *confidence* para pelaku ekonomi dalam negeri; dengan pulihnya kepercayaan pelaku-pelaku dalam negeri, kepercayaan para pelaku luar negeri akan ikut kembali pulih.

Dengan pulihnya *confidence* secara bertahap, maka kurs Rupiah yang mulai stabil dapat kita pertahankan, dan secara gradual makin baik dan akhirnya mencapai tingkat yang wajar.

Karena melemahnya kurs Rupiah adalah penyebab terpenting dari inflasi saat ini, maka dengan stabilnya kurs pada tingkat yang wajar, tekanan inflasi mereda dan laju inflasi akan terus menurun. Harga barang-barang pokok, serta subsidi yang harus disediakan, akan juga menurun secara bertahap. Menurunnya inflasi akan diikuti dengan menurunnya tingkat bunga.

Bersama-sama dengan mulai berhasilnya pembenahan perbankan dan makin banyaknya para pelaku ekonomi yang mulai merasa aman, tenteram dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, penurunan tingkat bunga akan mendorong bangkitnya kembali kegiatan ekonomi dalam negeri.

Pada akhirnya akan tercapai keadaan di mana kegiatan ekonomi kembali normal, lapangan kerja baru mulai terbuka lagi, inflasi menurun pada tingkat wajar, kurs Rupiah relatif stabil pada tingkat yang konsisten dengan pola kegiatan ekonomi normal.

Berbagai upaya tersebut memang tidak semuanya segera nampak hasilnya, oleh karena luas dan dalamnya krisis ekonomi yang kita alami. Namun, arahnya telah jelas dan kita mempunyai harapan bahwa dengan kerja keras kita akan mampu mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dewasa ini.

Kita mengharapkan bahwa masa yang terburuk telah kita lewati dan sekitar awal tahun depan ekonomi kita akan mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi akan kembali positif memasuki tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi kita selanjutnya, akan lebih *sustainable* karena dasar-dasar perekonomian kita, setelah melalui masa yang sulit ini dan setelah kita melakukan perbaikan-perbaikan, akan lebih kuat dan lebih kukuh untuk menyangga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan sendirinya kesemua itu tidak akan tercapai begitu saja. Tanda pulih kembalinya kepercayaan adalah kita telah mampu menarik modal dan mencegah pelarian modal. Untuk itu kita semua harus turut berupaya. Untuk itu perlu ada dukungan stabilitas politik dan keamanan yang kita artikan sebagai stabilitas dan keamanan yang didukung oleh rakyat secara demokratis.

Kita telah memilih sekaligus reformasi ekonomi dan politik dalam waktu yang bersamaan. Pelajaran kejadian terakhir dengan maraknya unjuk rasa dan perdebatan di bidang politik, ternyata dari berbagai indikator ekonomi kita masih dapat tetap bertahan. Dengan asumsi perekonomian dapat secara bersama-sama kita pertahankan dan tingkatkan terus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir pada teori urutan *consecutive* yang menyatakan reformasi ekonomi dahulu, dengan menunda dahulu reformasi politik, karena khawatir terjadi instabilitas dan disintegrasikan. Atau sebaliknya.

Kemampuan kita melaksanakan reformasi yang paripurna ini (tentu termasuk reformasi di bidang hukum, hak-asasi manusia dan lainnya), terlebih dengan penyelenggaraan Pemilu 1999 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta mendapat dukungan penuh dari rakyat dan diikuti oleh dunia internasional, Insya Allah, akan mengantarkan kita pada negara dan masyarakat demokratis. Perekonomian kita akan lebih kuat dan maju, karena masyarakat kita menjadi lebih efisien, produktif, kreatif dan inovatif. Pemberdayaan ekonomi rakyat pun akan dapat kian berkembang dalam kehidupan negara yang lebih demokratis.

Seperti telah saya kemukakan, tidak saja bagi pemerintah yang perlu merencanakan dan melaksanakan kebijakan ekonomi demikian juga KADIN dengan anggotanya. Kita harapkan KADIN dalam Munas-nya sekarang ini dapat menjawab berbagai tantangan tadi.

Demikianlah sekedar sambutan dari saya. Selamat ber-Munas, semoga sukses.